

Analisis Stakeholder Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Rossiana Puspita Dewi¹, Anggraeny Puspaningtyas², Indah Murti³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

rossianapuspita30@gmail.com,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id,
sby.ac.id,endah@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran stakeholder dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT melibatkan beberapa stakeholder utama, yaitu Dinas Sosial sebagai pengarah kebijakan, Bank BNI sebagai penyedia layanan perbankan, pendamping sosial PKH/TKSK sebagai penghubung lapangan, e-warong sebagai penyedia komoditas, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan. Pelaksanaan program berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan kendala seperti ketersediaan komoditas yang belum stabil, gangguan transaksi, dan pemahaman KPM yang masih terbatas. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antar stakeholder untuk meningkatkan efektivitas BPNT di Kecamatan Cerme.

Kata Kunci: BPNT, Stakeholder, Pelaksanaan Program, Kecamatan Cerme

A B S T R A C T

This study aims to analyze the role of stakeholders in the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Cerme District, Gresik Regency. The method used is descriptive qualitative through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the BPNT program involves several key stakeholders, namely the Social Service as policy director, Bank BNI as a banking service provider, PKH/TKSK social assistants as field liaisons, e-warong as commodity providers, and Beneficiary Families (KPM) as aid recipients. The program implementation went quite well, although there were still obstacles such as unstable commodity availability, transaction disruptions, and limited understanding of KPM. This study emphasizes the importance of coordination between stakeholders to improve the effectiveness of BPNT in Cerme District.

Keywords: BPNT, Stakeholders, Program Implementation, Cerme District

1. PENDAHULUAN

“Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga menghambat kemampuan untuk memepertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat” (Adawiyah, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan secara tepat agar masyarakat dapat hidup di atas garis kemiskinan serta mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa pangan maupun kebutuhan

*Corresponding author

E-mail addresses: rossianapuspita30@gmail.com



lainnya. “Pemerintah yang memiliki program bukan berarti kemiskinan akan hilang begitu saja. Pasalnya, bantuan sosial yang diberikan belum sampai ke penerima yang dituju. Hal ini terjadi karena program bantuan tersebut masih berdasarkan data yang sudah tidak berlaku lagi. Namun, kejadian ini menyebabkan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin menjadi tidak tepat sasaran karena masyarakat menjadi tergantung pada program tersebut dan tidak mau keluar dari zona kemiskinan karena merasa nyaman menerima bantuan”(Zirtana et al., 2025).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, dengan menerapkan mekanisme akun elektronik sehingga hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang telah bekerjasama dengan bank Himbara. “Tujuan dari program ini untuk meringankan beban KPM dan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang seimbang, sehingga secara garis besar penyaluran bantuan ini diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat” (Ilmu et al., n.d.). Hal ini sejalan dengan tujuan utama Program Bantuan Pangan Penerima Manfaat (BPNT) yang bertujuan untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan pola makan yang baik, dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bantuan ini juga sejalan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sebagaimana ada dalam Undang-Undang. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh berbeda sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Kementerian Sosial memiliki peran sentral sebagai penentu kebijakan nasional, penyusun pedoman pelaksanaan, serta penetapan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Permensos No. 11 Tahun 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Dinas Sosial berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan BPNT di wilayahnya, melakukan verifikasi dan validasi data penerima, memfasilitasi kerja sama antara bank penyalur, e-warong, dan pendamping sosial, serta mengawasi kelancaran penyaluran bantuan (P, 2019). Stakeholder yang terkait dalam penyaluran ini terdiri dari: Dinas Sosial, Bank Penyalur (Himbara), E-Warong (Agen penyalur), Pendamping Sosial, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Peran masing-masing stakeholder memengaruhi keberhasilan BPNT dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, memperbaiki ketahanan pangan, dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Jika koordinasi dan sinergi berjalan optimal sesuai Permensos No. 11 Tahun 2018, maka bantuan dapat tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sehingga manfaatnya maksimal (Mabruri, 2024). Kondisi ini terjadi karena kesempatan kerja di Kabupaten Gresik tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat, karena sebagian besar sektor industri modern terkonsentrasi pada kawasan tertentu. Selain itu, tingkat pendidikan penduduk mengakibatkan perbedaan kemampuan dalam mengakses pekerjaan dengan upah layak. Sementara itu, sebagian wilayah perdesaan di Kabupaten Gresik masih mengandalkan sektor pertanian dan perikanan dengan produktivitas rendah, sehingga tingkat pendapatan rumah tangga tetap terbatas. Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang tiap bulannya mendapatkan jatah



beras. Namun dalam pedoman umum penyaluran BPNT yang dikeluarkan Kemensos menyebutkan bahwa e-warung sebagai outlet pembelian bantuan pangan tidak diperkenankan melakukan sistem paket pangan. KPM juga mempunyai hak untuk mencairkan seluruh atau sebagian dana yang ada. Dengan adanya sistem paket maka KPM akan mendapatkan pembatasan dalam berbelanja (Kabar Gresik, 2018).

Pendekatan berbasis hak berpendapat bahwa semua penduduk, termasuk yang miskin, harus memiliki akses terhadap perlindungan dasar yang sama. Definisi kemiskinan modern melampaui ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga mencakup ketimpangan perlakuan dan pengingkaran hak-hak dasar, yang keduanya menyebabkan seseorang tidak dapat hidup layak. Setiap orang berhak atas pangan yang cukup, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal yang aman, tempat tinggal yang layak, air bersih, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, tanpa memandang jenis kelamin, dan untuk bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan juga merupakan hal yang mendasar. Untuk menganalisis peran para pihak yang terlibat, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984). Dengan teori tersebut, penelitian dapat diarahkan untuk menganalisis kontribusi, interaksi, dan koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Gresik, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu pemerintahan dan administrasi publik yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana pemerintah menjalankan fungsi, peran, serta kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Secara sederhana, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian keputusan, pilihan, tindakan, maupun program yang disusun, dirancang, dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik diwujudkan melalui program-program perlindungan sosial, salah satunya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterapkan di Kabupaten Gresik. Program ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, BPNT dapat dipandang sebagai salah satu wujud nyata kebijakan publik yang menghubungkan kepentingan negara dalam penanggulangan kemiskinan dengan kepentingan masyarakat penerima manfaat.

Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik merupakan salah satu cabang penting dalam studi kebijakan yang berfokus pada bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, serta dievaluasi. Tujuan utama dari analisis kebijakan adalah untuk memahami realitas kebijakan, menilai dampaknya, serta memberikan rekomendasi agar kebijakan publik dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Dunn (2003), analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang mengintegrasikan berbagai metode penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, analisis kebijakan tidak hanya bersifat deskriptif yakni menjelaskan fenomena dan dinamika kebijakan

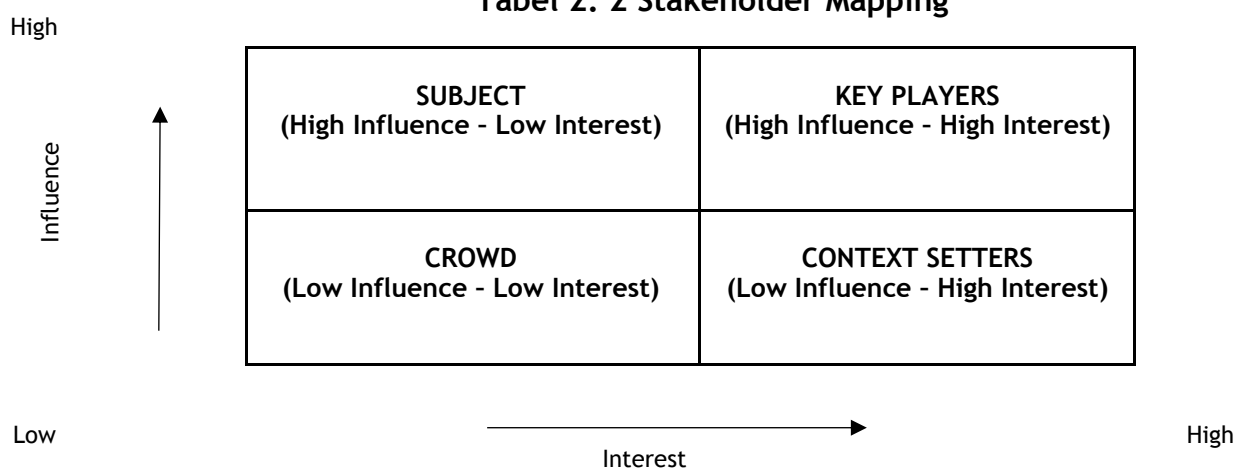


tetapi juga normatif karena memberikan masukan mengenai kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah.

Analisis Stakeholder

Freeman (1984) dalam *Stakeholder Theory* mendefinisikan stakeholder sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Definisi ini kemudian diperluas dalam ranah kebijakan publik, di mana stakeholder bukan hanya pemerintah sebagai pengambil keputusan formal, melainkan juga masyarakat sipil, kelompok kepentingan, sektor swasta, lembaga donor, media, hingga kelompok penerima manfaat. Setiap aktor membawa kepentingan, harapan, dan tingkat pengaruh yang berbeda, sehingga pemahaman mengenai posisi yang menjadi krusial bagi implementasi kebijakan. Analisis stakeholder dilakukan bukan hanya untuk mengetahui siapa yang terlibat, tetapi juga untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antar-aktor yang seringkali kompleks.

Tabel 2. 2 Stakeholder Mapping



Sumber: (Fadillah Putra, 2020)

Tabel 2.2 menggambarkan bahwa dalam pemetaan stakeholder pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), aktor-aktor kunci dapat ditempatkan pada empat kategori utama sesuai dengan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Dinas Sosial bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada dalam kategori *key players* (*High influence - High interest*) karena keduanya memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi, sehingga wajib dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program. Bank Himbara termasuk kategori *subjects* (*High influence - Low interest*) dengan pengaruh tinggi namun kepentingan rendah, sebab meskipun tidak secara langsung merasakan manfaat, lembaga ini berperan penting dalam proses penyaluran bantuan. Sementara itu, agen e-warong masuk kategori *context setters* (*Low influence - High interest*) karena memiliki kepentingan tinggi untuk kelancaran distribusi bantuan, meskipun pengaruhnya terhadap arah kebijakan relatif terbatas. Adapun pendamping sosial digolongkan ke dalam *crowd* (*Low influence - Low interest*) yang memiliki kepentingan maupun pengaruh rendah, sehingga keterlibatannya tidak sebesar kelompok lain, meskipun tetap diperhatikan sebagai bagian dari pelaksanaan program.



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam peran, kepentingan, dan keterlibatan para stakeholder dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung berupa dokumen, laporan, dan publikasi resmi yang relevan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) seperti Dinas Sosial, pendamping sosial, pengelola e-warong, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh informasi rinci mengenai mekanisme penyaluran, persepsi mereka terhadap efektivitas program. Observasi langsung dilakukan di lokasi penyaluran untuk melihat kondisi nyata di lapangan, termasuk alur pelayanan di e-warong, kualitas komoditas yang disalurkan, proses interaksi antar-stakeholder, serta berbagai dinamika teknis yang tidak selalu terungkap melalui wawancara. Sementara itu, dokumentasi foto. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran stakeholder dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung dianalisis secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Proses analisis data dilakukan mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana, 2014. Aktivitas dalam analisis terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing & verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cerme

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan melalui sistem non-tunai. Di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pelaksanaan BPNT menjadi program strategis mengingat masih adanya jumlah keluarga kurang mampu yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.



Program BPNT di Cerme disalurkan setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan KPM untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur di e-warong yang telah ditetapkan. Walaupun mekanisme non-tunai ini bertujuan meningkatkan transparansi, namun di lapangan masih ditemukan tantangan, seperti keterbatasan jumlah e-warong di beberapa desa, ketersediaan komoditas yang tidak selalu stabil, serta perbedaan kualitas bahan pangan. Dari sisi sosial, masyarakat Cerme memiliki karakter gotong royong dan solidaritas yang cukup kuat. Nilai ini berpengaruh positif terhadap pelaksanaan BPNT karena KPM cenderung saling membantu dalam proses pengambilan bantuan, terutama bagi lansia atau keluarga yang memiliki keterbatasan mobilitas. Namun demikian, perubahan sosial seperti urbanisasi dan peningkatan kebutuhan ekonomi turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas program.

Selain itu, pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan KPM memahami prosedur penggunaan KKS, penyelesaian kendala teknis seperti saldo tidak masuk, kartu tidak terbaca, atau data KPM yang perlu diperbarui. Kerja sama antara pendamping, pemerintah desa, dan e-warong menjadi faktor penentu kelancaran distribusi bantuan setiap bulannya. Melihat kondisi sosial-ekonomi Cerme yang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pekerjaan formal, penghasilan yang tidak stabil, serta ketimpangan akses pelayanan publik antar desa, BPNT menjadi program yang sangat relevan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga kurang mampu. Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cerme merupakan contoh nyata bagaimana program bantuan sosial di tingkat lokal berusaha menjawab permasalahan kemiskinan dan kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dampak Program BPNT terhadap KPM di Kecamatan Cerme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan dampak yang cukup berarti bagi kondisi sosial-ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Cerme. Program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pangan pokok seperti beras dan telur, sehingga sebagian KPM dapat mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan anak atau biaya kesehatan. Selain itu, sistem non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai mampu memberikan pengalaman baru bagi KPM dalam mengakses bantuan dengan lebih teratur dan tertib. Dampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara struktural masih belum signifikan, karena bantuan pangan tidak secara langsung meningkatkan pendapatan atau kapasitas ekonomi keluarga. Namun, secara keseluruhan BPNT berkontribusi dalam menjaga stabilitas konsumsi, mengurangi kerentanan pangan, dan memberikan rasa aman bagi keluarga miskin dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dalam pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cerme dilakukan melalui kombinasi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Gresik, pendamping sosial BPNT/PKH, serta pemerintah desa. Berdasarkan temuan penelitian, pengawasan administratif seperti pengecekan data KPM, validasi kelayakan penerima, dan laporan realisasi penyaluran berjalan cukup konsisten. Pendamping sosial aktif melakukan pemantauan terhadap proses transaksi, memastikan saldo masuk tepat waktu, dan memfasilitasi penyelesaian masalah ketika terjadi kendala teknis. Pengawasan terhadap e-warong masih menjadi titik lemah, terutama dalam aspek pengecekan kualitas barang, transparansi harga, serta penyediaan stok yang memadai.

Penegakan hukum dalam bentuk sanksi administratif atau pencabutan hak kerja sama bagi e-warong yang melanggar sudah tersedia secara formal, namun implementasinya masih belum maksimal karena sebagian besar penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan persuasif atau koordinasi informal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan



yang lebih tegas dan terstruktur agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan pedoman pemerintah pusat.

Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT

Efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu ketepatan sasaran, kelancaran mekanisme penyaluran, kualitas pelayanan di e-warong, serta manfaat yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh KPM setiap bulan melalui mekanisme non-tunai yang lebih transparan dibandingkan metode distribusi sebelumnya. Pendamping sosial berperan besar dalam menjaga kelancaran penyaluran, mulai dari memastikan saldo masuk tepat waktu, membantu KPM yang mengalami kendala pada kartu KKS, hingga melakukan pendampingan teknis saat terjadi gangguan sistem. Namun, efektivitas di lapangan masih dipengaruhi oleh adanya keterbatasan distribusi e-warong yang tidak merata di seluruh desa, sehingga beberapa KPM harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengakses bantuan. Di sisi lain, kualitas pelayanan di e-warong tidak selalu sama; beberapa e-warong mampu menyediakan stok yang lengkap dan berkualitas, sementara yang lain mengalami keterlambatan suplai sehingga mengurangi pilihan komoditas bagi KPM.

Secara teknis, efektivitas program juga dipengaruhi oleh kelancaran sistem elektronik. Dalam beberapa periode penyaluran, ditemukan kendala seperti gangguan jaringan, saldo yang terlambat masuk, atau mesin EDC yang tidak berfungsi dengan baik. Kendala tersebut menyebabkan antrian panjang dan penundaan transaksi, terutama pada hari pertama penyaluran. Meskipun begitu, sebagian besar KPM menyatakan bahwa program ini tetap membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan sistem non-tunai dianggap meminimalkan potensi penyelewengan bantuan. Efektivitas program juga dapat dilihat dari tingkat penerimaan masyarakat yang cenderung positif, meskipun masih terdapat kelompok KPM lansia atau yang kurang memahami teknologi sehingga membutuhkan pendampingan lebih intensif. Secara keseluruhan, BPNT telah berjalan dengan cukup efektif, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek pemerataan infrastruktur e-warong, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan dukungan teknis agar tujuan program dapat tercapai lebih optimal.

Tantangan dan Kendala Pelaksanaan Program BPNT

Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cerme tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul baik dari aspek teknis, administratif, sosial, maupun struktural. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur penunjang, terutama dalam hal ketersediaan e-warong di seluruh desa. Beberapa desa memiliki akses e-warong yang dekat dan mudah dijangkau, namun desa lain berada jauh dari lokasi e-warong sehingga KPM harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan, terutama bagi yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi KPM yang seharusnya mendapatkan kemudahan akses pangan. Dari sisi teknis, gangguan pada mesin EDC, jaringan internet yang tidak stabil, serta saldo KKS yang terlambat masuk masih sering terjadi dan menghambat kelancaran penyaluran. Kondisi ini diperparah ketika gangguan terjadi secara bersamaan di beberapa e-warong, menyebabkan antrian panjang dan proses transaksi yang memakan waktu lama.

Tantangan berikutnya berasal dari aspek sosial dan pemahaman masyarakat terhadap aturan program. Sebagian KPM, terutama lansia dan warga dengan pendidikan rendah, masih menganggap bahwa bantuan BPNT adalah bantuan tunai yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan selain pangan. Hal ini menyebabkan beberapa konflik kecil di lapangan ketika e-warong menolak transaksi barang tertentu yang tidak sesuai pedoman program. Kesalahpahaman ini juga



memunculkan persepsi negatif atau kekecewaan KPM terhadap program. Selain itu, terdapat potensi kecemburuan sosial antara warga yang merasa lebih layak tetapi tidak terdaftar sebagai KPM, sehingga mempengaruhi dinamika sosial di tingkat desa. Pendamping sosial menghadapi tantangan tersendiri karena harus mengelola kelompok KPM yang besar dengan waktu dan tenaga yang terbatas, sementara kebutuhan pendampingan teknis dan sosial cukup kompleks.

Dari aspek struktural dan kelembagaan, koordinasi antar-stakeholder juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Meskipun telah ada mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, dan e-warong, namun pelaksanaannya di lapangan belum selalu berjalan konsisten. Misalnya, beberapa e-warong tidak memberikan laporan stok secara rutin atau menghadapi keterlambatan suplai dari distributor. Di sisi lain, pemerintah desa belum selalu melakukan pengawasan aktif karena keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pengawasan dan evaluasi sering bersifat reaktif, bukan preventif. Tantangan lain muncul dari dinamika data KPM yang sering berubah karena proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga berdampak pada ketidakpastian status KPM setiap periode. Semua kendala ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cerme membutuhkan penguatan dari sisi teknis, sosialisasi, koordinasi, dan infrastruktur agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih maksimal bagi keluarga penerima manfaat.

PEMBAHASAN

Efektivitas Forum dalam Pelaksanaan Program BPNT

Efektivitas forum dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat bergantung pada bagaimana berbagai aktor yang terlibat seperti Dinas Sosial, pendamping sosial, e-warong, pemerintah desa, bank penyalur, dan KPM dapat berinteraksi, bertukar informasi, dan menyelesaikan masalah secara bersama. Dalam praktiknya, forum ini tidak hanya terbentuk melalui rapat formal, tetapi juga melalui komunikasi sehari-hari di tingkat desa dan kecamatan, termasuk melalui pertemuan rutin pendamping sosial, rapat desa, serta media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Forum ini menjadi ruang bagi para pelaksana untuk menyampaikan kendala yang mereka temui, mulai dari keterlambatan saldo, masalah stok komoditas, harga tidak stabil, hingga keluhan KPM terkait kualitas barang yang diterima.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas forum ini masih perlu ditingkatkan karena sebagian aktor terutama KPM dan pengelola e-warong belum selalu mendapatkan informasi secara cepat maupun lengkap. Kadang pendamping sosial menerima informasi lebih awal, tetapi tidak selalu langsung tersampaikan ke tingkat desa. Begitu pula e-warong, sering kali tidak mendapatkan pembaruan terkait ketentuan harga maupun perubahan teknis dari bank penyalur. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan informasi yang membuat proses penyaluran bantuan berjalan tidak seragam. Untuk itu, forum komunikasi harus diperkuat menjadi wadah yang terbuka, sistematis, dan rutin agar setiap pihak dapat menyampaikan masukan, menetapkan solusi bersama, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan program sesuai aturan. Semakin solid forum yang terbentuk, semakin efektif pula pelaksanaan BPNT di tingkat lapangan.

Mekanisme Koordinasi

Koordinasi memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan Program BPNT, karena penyaluran bantuan membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak Dinas Sosial sebagai pembina, pendamping sosial sebagai pelaksana teknis, bank penyalur sebagai pemegang kendali sistem keuangan, e-warong sebagai penyedia komoditas, serta pemerintah desa sebagai fasilitator. Proses koordinasi yang berjalan selama ini sebagian besar dilakukan dalam bentuk rapat mingguan atau bulanan, penyampaian informasi melalui pendamping sosial, dan laporan penyaluran yang disampaikan kepada pihak kecamatan maupun kabupaten.



Meskipun terdapat mekanisme koordinasi, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek evaluatif secara mendalam. Masalah teknis seperti saldo tidak masuk, perubahan harga komoditas, hingga perbedaan kualitas barang di e-warong tidak selalu ditindaklanjuti secara cepat karena informasi tidak tersampaikan secara merata ke semua aktor. E-warong sering kali tidak mengetahuinya secara langsung, sementara KPM masih kurang berani menyampaikan keluhan karena takut mengganggu proses penyaluran. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan responsif. Pembentukan tim kerja lintas-aktor di tingkat kecamatan dapat menjadi solusi agar proses monitoring, evaluasi, dan penyelesaian masalah bisa dilakukan secara terpadu. Selain itu, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi agar alur penyampaian informasi menjadi lebih jelas, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke KPM. Pemerintah desa juga berperan besar sebagai penghubung antara masyarakat dan pelaksana program, sehingga harus diberi ruang lebih besar dalam koordinasi agar mampu menjembatani kepentingan semua pihak.

Fleksibilitas Adaptif dalam Pelaksanaan Program BPNT

Fleksibilitas adaptif sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Program BPNT, mengingat kondisi lapangan selalu berubah, baik dari sisi ketersediaan barang, situasi ekonomi, perubahan kebijakan, maupun dinamika sosial masyarakat. Pelaksana program harus mampu menyesuaikan langkah-langkah yang diambil agar penyaluran bantuan tetap berjalan meski menghadapi berbagai hambatan. Pada tingkat e-warong, fleksibilitas adaptif terlihat dari kemampuan mereka menyesuaikan penyediaan komoditas pangan dengan kondisi pasar lokal. Selain itu, e-warong perlu menyesuaikan manajemen stok agar tidak terjadi kekurangan barang pada saat penyaluran. Pendamping sosial juga dituntut memiliki fleksibilitas tinggi dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada KPM. Gangguan pada sistem perbankan, keterlambatan saldo, atau kebijakan baru dari Kementerian Sosial harus mampu mereka jelaskan dengan cepat agar KPM tidak kebingungan.

Sementara itu, pemerintah desa perlu beradaptasi dalam memberikan dukungan administratif dan membantu menyelesaikan keluhan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, fleksibilitas adaptif diperlukan untuk merespons perubahan harga kebutuhan pokok yang bersifat fluktuatif. Ketika harga komoditas naik, e-warong harus menyesuaikan daftar barang agar jumlah dan kualitas barang tetap sesuai standar. Dengan peningkatan kemampuan adaptif ini, BPNT dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun terdapat tantangan di lapangan.

Kerangka Hukum

Kerangka hukum menjadi pijakan penting agar seluruh pelaksanaan Program BPNT dapat berjalan sesuai prosedur. Aturan yang mengatur BPNT mencakup pedoman umum dari Kementerian Sosial, aturan teknis penyaluran bantuan non-tunai, standar kualitas komoditas pangan, hingga ketentuan pengawasan dan evaluasi. Aturan tersebut berfungsi memastikan bahwa seluruh aktor, mulai dari pendamping sosial hingga e-warong, memahami hak, kewajiban, serta batasan dalam melaksanakan tugas. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi kerangka hukum masih belum berjalan konsisten. Sebagian e-warong belum sepenuhnya mengikuti aturan harga atau masih menawarkan paket sembako jadi, padahal KPM berhak memilih komoditas sendiri. Di sisi lain, masih ada KPM yang tidak memahami aturan dasar program sehingga tidak tahu mekanisme pengaduan ketika mengalami masalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah tersedia, penegakan dan sosialisasinya masih lemah. Agar kerangka hukum lebih efektif, diperlukan pengawasan lebih kuat dan pembinaan berkelanjutan kepada seluruh



pelaksana program. Pemerintah desa juga harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya penyaluran karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Analisis Sumber Daya

Keberhasilan BPNT sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan penyediaan komoditas. Sumber daya manusia seperti pendamping sosial memegang peranan penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Namun, rasio antara jumlah pendamping sosial dan jumlah KPM yang tinggi membuat pendamping sosial sering kewalahan dalam memberikan edukasi, melakukan monitoring, dan mengatasi keluhan masyarakat. Dari sisi teknologi, BPNT bergantung pada sistem perbankan, mesin EDC, dan aplikasi digital. Gangguan teknis seperti jaringan bermasalah, saldo terlambat masuk, atau EDC tidak berfungsi dapat menyebabkan penyaluran terhambat. Hal ini sering mengakibatkan antrean panjang dan ketidakpastian bagi KPM. Sumber daya keuangan merupakan aspek penting karena bantuan disalurkan secara non-tunai melalui rekening KPM. Meskipun mekanisme ini lebih aman, realisasi pencairan sering kali dipengaruhi oleh kebijakan pusat yang menyebabkan ketidakaturan jadwal penyaluran. Terakhir, sumber daya komoditas di e-warong sangat menentukan kualitas bantuan yang diterima KPM. Ketersediaan barang, harga pasar, dan kualitas komoditas merupakan faktor yang harus diawasi ketat karena langsung berdampak pada kepuasan dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, alokasi sumber daya BPNT harus dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan mempertimbangkan kondisi lapangan agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan interaksi antar stakeholder. Dinas Sosial dan KPM menjadi aktor utama yang memiliki peran besar dalam keberlangsungan program, di mana Dinas Sosial bertanggung jawab atas pendataan, validasi, penyaluran, hingga pengawasan kualitas bantuan, sementara KPM berperan menentukan efektivitas program melalui tingkat pemahaman, kepatuhan, dan respon mereka terhadap mekanisme penyaluran. Bank BNI turut memegang peran teknis penting sebagai penyalur dana lewat sistem perbankan, sehingga stabilitas layanan dan kelancaran transaksi sangat mempengaruhi proses pencairan bantuan. Di tingkat lapangan, e-warong menjadi penentu pengalaman penerima manfaat karena menyediakan komoditas dan pelayanan langsung, meskipun kewenangannya terbatas pada operasional. Pendamping sosial PKH/TKSK juga memegang peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, membantu penyelesaian berbagai kendala administratif serta menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan. Secara umum, hubungan antar stakeholder telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, perbaikan komunikasi, serta penguatan kapasitas pelaksana teknis agar pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cerme dapat semakin efektif dan berdampak lebih optimal bagi KPM.

Saran

a. Dinas Sosial

Perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta melakukan evaluasi berkala agar pelaksanaan program BPNT berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.

b. Pendamping Sosial



Diharapkan meningkatkan intensitas pendampingan, mempercepat penanganan keluhan KPM, serta memastikan pemahaman KPM terhadap prosedur penyaluran.

c. Pengelola E-Warong

E-warong perlu menjaga kualitas dan ketersediaan bahan pangan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memastikan pelayanan yang profesional kepada KPM.

d. Bank Penyalur (BNI)

BNI disarankan memperbaiki keandalan sistem transaksi nontunai dan menyediakan layanan pengaduan yang responsif agar kendala KKS dapat segera ditangani.

e. KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

KPM diharapkan lebih aktif mencari informasi, menjaga kartu KKS, serta melaporkan kendala yang ditemui agar proses penyaluran bantuan berjalan lancar.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya*. 1(April), 43-50.

Ailiyah, N., Chalimah, N., Fauzi, M. A. N., & Wahyudi, M. A. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo. *Sosio Konsepsia*, 12(3), 131-141. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3359>

Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196-202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>

Fadillah Putra. (2020). *Stakeholder Mapping*. <https://youtu.be/d5elAxxMxmA>

Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)..... EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO* Dwita Agustina Suci Megawati. 175-190.

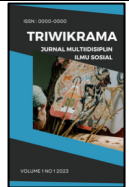
Kiswanto, E. (2021). *Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*. 129-144.

Mabruri, M. A. . A. J. A. G. dan B. S. H. (2024). Analisis Peran Stakholders Dalam Penangulangan Kemiskinan (studi pada penangulangan kemiskinan diKabupaten Lamongan). *Jurnal Adminitrasi Publik*, 6(3), 130-135.

Maharani, P. (2023). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. 1-136.

Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Ananda Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo. *Journal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 151-158. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.7>

P, K. K. (2019). *PERMENSOS TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI*.



373426.

Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>

Putri, L. M. (2023). *collaborative governance; implementation; non-cash food assistance*. 1-13.

radargresik.id. (2025). *Proses pencairan Bansos PKH dan BPNT, 2025*. <https://share.google/2ti28NU1GC2ltfoWf>

Rahmadani, M. I. (2019). *INFORMASI PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI*. 4(4), 444-454.

Ridena, S. (2020). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 39-48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>

Wiwit, W., Kamil, M., & Sulistyaningsih, T. (2020). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11, 1-12. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.9379>

Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). 1347-Article Text-3398-1-10-20220228. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.

Zirtana, H., Baiquni, M., & Sudrajat. (2025). Pengaruh Ketimpangan Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia : Analisis Data Panel 2015 - 2021 The Effect of Socio-Economic Inequality on Poverty in Disadvantaged Regions of Indonesia in 2015 - 2021 Pendahuluan Pengentasan kemisk. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 16(1), 35-51.